

## FAKTOR PENYEBAB DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MENGHAPUS KEMISKINAN *Causes of Poverty and Yogyakarta Government Policy for Eradicating Poverty*

Juli Panglima Saragih

---

### Abstract

In implementing policies to eradicate poverty in DI Yogyakarta within allocation of money, there is no decreasing of significant number of the poor in DI Yogyakarta until now. Both central and DI Yogyakarta governments have already been running some policies. Therefore, DI Yogyakarta government is needed to identify main factors that cause poverty faced by its people. Some of those factors are low of percapita income of people, people having no productive business, and less natural resources, as well. The result of analysis shows that low per capita income and regulation concerning on special region of Yogyakarta caused number of poor people. In future, Yogyakarta government should create new strategy of policies such as increasing job creation, increasing and creating much business opportunities, other than aid money directly for the poor. Developing potential of local economic can hopefully increasing income per capita of the poor.

**Keywords:** poverty, government policy, Yogyakarta Provincial Government.

---

### Pendahuluan

Kemiskinan (*poverty*) masih menjadi salah satu permasalahan utama bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki isu ke-miskinan yang perlu dituntaskan. Menurut Tim Nasional Percepatan dan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), pada tahun 2010, tingkat kemiskinan di Indonesia adalah 13,33% dari total penduduk Indonesia, atau sekitar 31,02 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan data BPS, jumlah orang miskin hingga September 2013 mencapai 28,55 juta orang naik dari bulan Maret 2013 sebesar 28,07 juta orang. Kenaikan ini sebagian besar disebabkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak

(BBM) yang berdampak langsung pada kenaikan ongkos transportasi dan harga barang. Secara nasional, angka kemiskinan Indonesia 1998-2013 terus menurun. Penurunan tersebut tidak lepas dari upaya keras pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan melalui berbagai program pro rakyat. Walau dapat dikatakan belum maksimal, tren penurunan angka kemiskinan menunjukkan bahwa program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan pemerintah telah memberikan efek positif bagi peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan hak-hak dasar. Berdasarkan RPJM 2010-2014, target kemiskinan pada akhir tahun 2014 adalah sebesar 8-10% dari total penduduk.

---

Alamat Korespondensi:

Juli Panglima Saragih, Peneliti Madya Bidang Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian,  
Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI  
E-mail: [saragihjulipanglima@yahoo.co.id](mailto:saragihjulipanglima@yahoo.co.id).

**Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia, Tahun 2005-2013**

Keterangan	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Sept.2013
Jlh Penduduk Miskin (juta org)	35,1	39,3	37,17	34,96	32,53	31,02	30,02	29,13	28,55
Penduduk Miskin (%)	15,97	17,75	16,58	15,42	14,15	13,33	12,49	11,96	11,70%

Sumber: Buku Lampiran Pidato Presiden pada Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI 16 Agustus 2012 dan Buku Statistik Indonesia Tahun 2013, BPS Jakarta.

Salah satu daerah di Indonesia yang penduduk miskinnya masih cukup tinggi adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pada tahun 2009 jumlah penduduk miskin di DIY mencapai 585.800 orang dan 2010 berjumlah 577.300 orang atau turun sekitar 1,45%. Pada tahun 2010, tingkat kemiskinan rata-rata di DIY mencapai 16,83% dari total penduduk. Sedangkan Indonesia men-capai 13,33% dari total penduduk secara nasional. Kabupaten Kulon Progo memiliki tingkat kemiskinan tertinggi tahun 2010 sebanyak 23,15% disusul Kabupaten Gunung Kidul 22,05%, Kabupaten Bantul 16,09%, Kabupaten Sleman 10,70% dan Kota Yogyakarta 9,75%.

Sampai September 2013, jumlah penduduk miskin di DIY mencapai 535.180 orang atau 15,03% dari total penduduk. Jumlah tersebut menurun sedikit dibandingkan tahun 2012 yang mencapai 15,8%. Angka ini yang paling tinggi di seluruh provinsi di Pulau Jawa. Bahkan angka ini masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan target pemerintah provinsi DIY yang menargetkan tingkat kemiskinan hanya 7–8% pada akhir RPJM 2010-2014. Meskipun tingkat kemiskinan di DIY relatif tinggi, namun angka

harapan hidup (AHH) masyarakat relatif lebih panjang rata-rata lebih dari 73 tahun apabila dibandingkan dengan rata-rata angka harapan hidup (AHH) nasional tahun 2012 sebesar 70,3 tahun.

Dilihat dari sisi penyumbang kemiskinan DIY, sektor pangan menyumbang kemiskinan lebih besar dibandingkan sektor non-pangan seperti sektor perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Sumbangan sektor makanan terhadap garis kemiskinan pada September 2013 mencapai 72,22% tidak jauh berbeda dengan September 2012 sebesar 71,50%. Di lihat dari PDB per kapita DIY, pada tahun 2010 pendapatan per kapita DIY sebesar Rp 13.196.158,72 dengan nominal PDB atas dasar harga berlaku tanpa Migas tahun 2010 sebesar Rp 45.625,6 Milyar. Jumlah PDB DIY tahun 2010 hanya berkontribusi sebesar 0,94% terhadap total PDB Indonesia sebesar Rp4.850.080,8 Milyar. Sedangkan garis kemiskinan di pedesaan per September 2013 berjumlah Rp 275.786,- per kapita per bulan dan di perkotaan berjumlah Rp 317.925,- per kapita per bulan.

Karakteristik penduduk miskin di DIY juga ditandai dengan rendahnya tingkat pendidikan. Dampaknya, pilihan lapangan kerja

yang dapat diakses warga menjadi terbatas. Tahun 2012, misalnya, 41,66 persen dari seluruh angkatan kerja miskin hanya mampu bekerja di sektor informal. Sektor informal yang dimaksud adalah sektor pertanian terutama buruh tani dan sejenisnya. Data tahun 2012 menunjukkan 34,38% penduduk DIY hanya tamat sekolah dasar ke bawah, diikuti dengan lulusan SLTP sebesar 18,29%, lulusan SLTA sebesar 34,01%, dan pendidikan Diploma ke atas sebesar 13,32%.

Menurut Bagian Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi DIY tahun 2013, upah minimum Kota Yogyakarta lebih dari Rp950.000 per bulan atau sebesar Rp1.065.247,-. Jumlah ini relatif lebih besar dibandingkan kabupaten lain di Provinsi DIY. Sedangkan UMK terkecil berada di Kabupaten Gunung Kidul yakni sebesar Rp947.114. Sedangkan UMP DIY tahun 2012 mencapai Rp892.660,- per bulan. Rata-rata Indonesia sebesar Rp1.088.903. (lihat tabel)

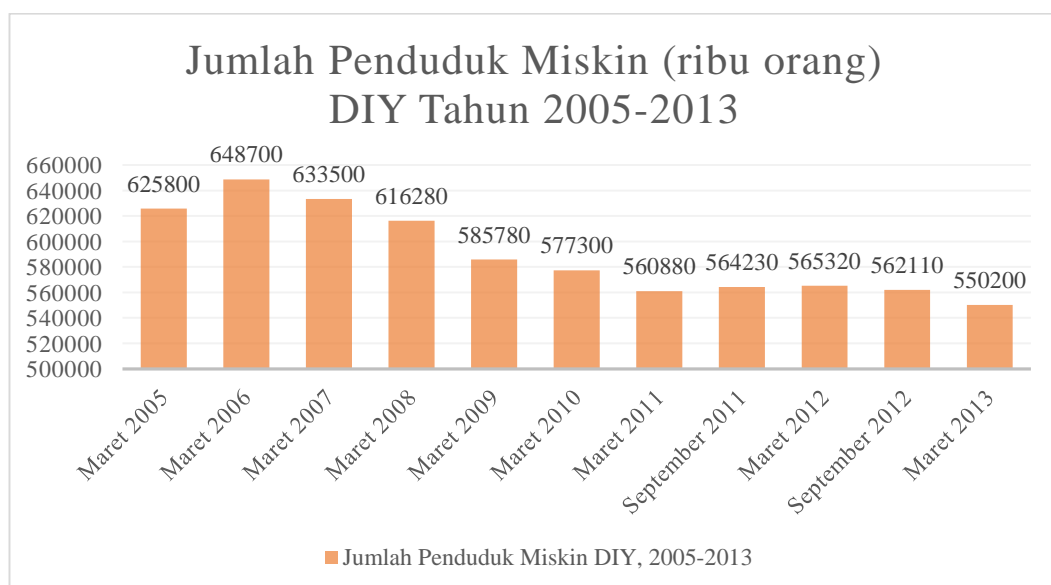
**Tabel 2. Upah Minimum Provinsi DI Yogyakarta dan Indonesia Tahun 2008-2013, (Rp/Bulan)**

Keterangan	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
DI Yogyakarta	460.000	500.000	586.000	700.000	745.694	808.000	892.660
Indonesia	602.702	673.261	743.174	841.529	908.824	988.829	1.088.903

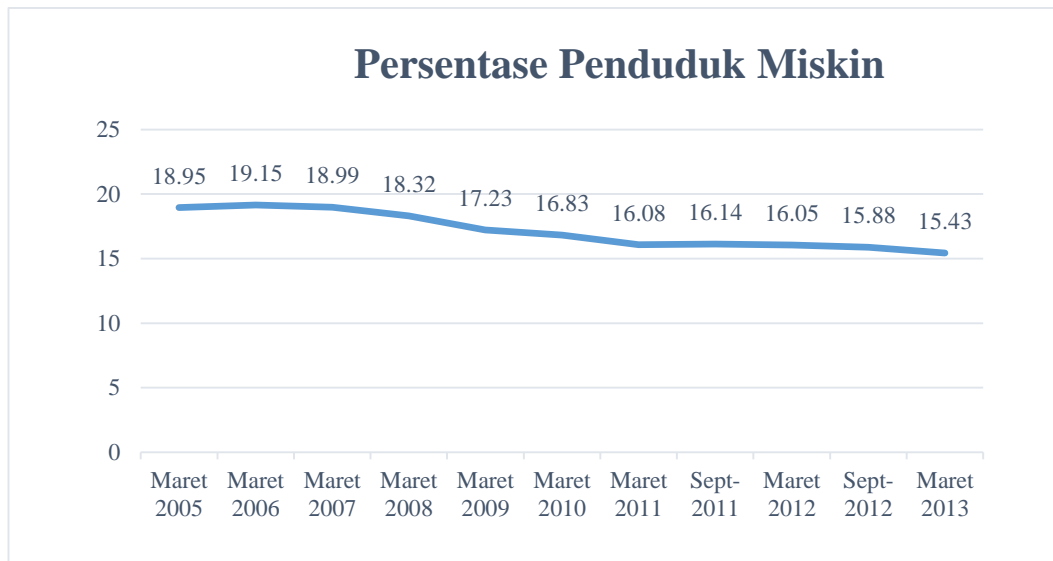
Sumber: Buku Statistik Indonesia 2013, Badan Pusat Statistik RI, Hal.112.

Fenomena ini menjadi menarik dan sekaligus memberikan bukti penting bahwa kemiskinan di Indonesia, termasuk di DIY pada dasarnya bersifat multidimensi. Oleh sebab itu perspektif dari sisi agregat ekonomi dalam melihat kemiskinan harus dilengkapi dengan indikator-indikator lainnya (non-ekonomi),

termasuk upaya nyata untuk meningkatkan kapasitas pribadi masyarakat (*human capital*) sehingga menjadi lebih mandiri. Di samping itu, pemerintah Provinsi DIY juga perlu mengetahui secara jelas faktor-faktor penyebab utama kemiskinan penduduk.



Sumber: DIY Dalam Angka Tahun 2012, BPS Provinsi DI Yogyakarta.



Sumber: DIY Dalam Angka Tahun 2012, BPS Provinsi DI Yogyakarta.

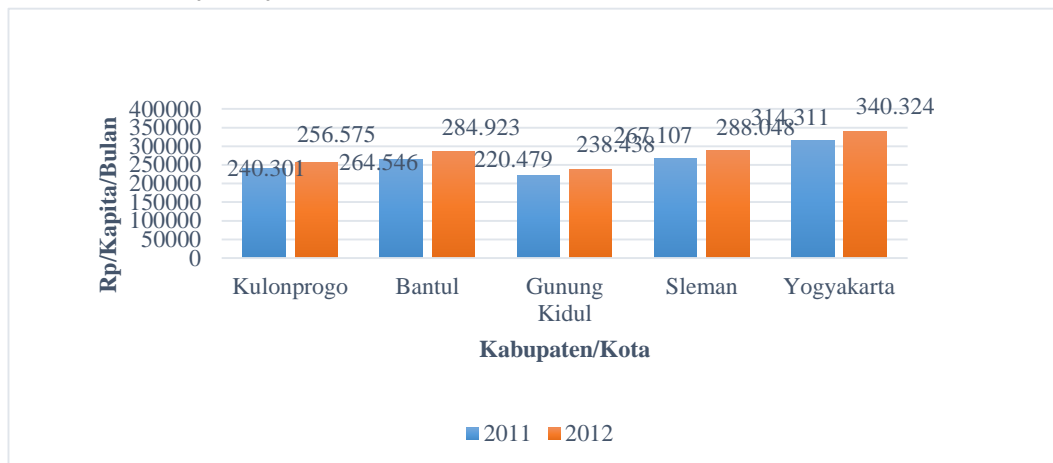
Berbagai program penanggulangan kemiskinan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah DIY sudah dilakukan selama ini. Program penanggulangan kemiskinan yang sudah dan sedang dijalankan oleh pemerintah pusat dan DIY antara lain yaitu: Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), dan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), yang dikategorikan sebagai Program Kerja Mandiri (*Self Employment Program*), dan Proyek Pembangunan Fisik dalam program PPK yang dikategorikan sebagai Program Padat Karya (*Public Work Program*).

Selain itu program penanggulangan kemiskinan di DIY yang melibatkan sosial budaya lokal adalah program penanganan kemiskinan terpadu "*Semangat Gotong Royong Agawe Majune Ngayogyakarta*". Segoro-Amarto tersebut merupakan program yang melibatkan partisipasi dari semua pihak untuk

menanggulangi kemiskinan dan tidak menjadikan masyarakat miskin sebagai obyek tetapi sebagai subyek pembangunan. Harapannya bahwa masyarakat yang lebih berdaya diharapkan dapat menstimulasi masyarakat lainnya yang kurang berdaya untuk bersama-sama mencapai kesejahteraan.

Dalam Musrenbangda DI Yogyakarta 2012, misalnya, program penanganan kemiskinan di DI Yogyakarta difokuskan pada 20 kecamatan di kabupaten/kota dengan 279 program. Kota Yogyakarta terdiri dari 74 program; Kab. Bantul 90 program; Kab.

Kulonprogo 90 program; Kab. Sleman 84 program; dan Kab. Gunung Kidul 86 program. Strategi program pro perluasan kesempatan kerja terdiri dari 13 program, pro kemiskinan 67 program; pro pertumbuhan ekonomi 54 program; pro lingkungan hidup 6 program dan pro tata kelola pemerintahan 72 program.

**Gambar 1. Perkembangan Garis Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011- 2012**

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus tulisan ini adalah mengkaji faktor-faktor penyebab utama kemiskinan di DI Yogyakarta, serta apa dan bagaimana kebijakan pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dalam menghapus kemiskinan penduduk. Oleh karena itu, pertanyaan yang muncul adalah mengapa angka kemiskinan penduduk masih relatif tinggi padahal berbagai program dan kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah sudah dilakukan selama ini.

## Kajian Teori

### A. Konsep dan Teori Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidak-mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi yang dimaksud penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan Garis

Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Dalam lingkup pengertian konvensional, kemiskinan hanya dimaknai sebagai permasalahan pendapatan (*income*) individu, kelompok, komunitas, masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan konsep *United Nation Development Program (UNDP)*, bahwa seseorang dikatakan

miskin jika tingkat pendapatannya hanya berada di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, upaya penanganan kemiskinan yang dilakukan pada negara dunia ketiga, baik pemerintah maupun organisasi non-pemerintah kebanyakan hanya bertumpu pada upaya peningkatan pendapatan. Itu sebabnya, berbagai upaya penanganan kemiskinan itu tidak menyelesaikan masalah dan cenderung gagal.

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi. Kemiskinan ditandai oleh keterbelakangan dan pengangguran, yang selanjutnya menjadi pemicu ketimpangan pendapatan dan kesenjangan antarmgolongan penduduk. Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kondisi kehidupan dengan standar kehidupan yang sangat rendah.

Beberapa konsep kemiskinan yang umum dikenal adalah yakni: *pertama*, kemiskinan absolut, yakni selalu dikaitkan dengan pendapatan dan kebutuhan. Kebutuhan tersebut hanya terbatas pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar (*basic need*). Kemiskinan absolut dapat digolongkan ke dalam dua bagian yaitu: (a) kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan (b) kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. *Kedua*, kemiskinan relatif, yakni tidak memiliki batas kemiskinan yang jelas. Sebagai analogi adalah seseorang yang tinggal di kawasan elit, yang sebenarnya memiliki *income* yang sudah cukup untuk memnuhi kebutuhan minimum, tetapi *income*-nya masih jauh lebih rendah dari rata-rata *income* masyarakat sekitarnya. Orang atau keluarga tersebut merasa dirinya masih miskin. Kemiskinan ini lebih banyak ditentukan lingkungannya.

Teori lingkaran setan kemiskinan pertama kali dikemukakan seorang ahli ekonomi penerima hadiah Nobel ekonomi, Ragnar Nurkse (Swedia). Teori ini menjelaskan sebab-sebab kemiskinan di negara berkembang yang umumnya baru merdeka dari penjajahan asing. Teori ini mengatakan bahwa negara sedang berkembang itu miskin dan tetap miskin, karena produktivitasnya rendah. Karena rendah produktivitasnya, maka penghasilan seseorang juga rendah yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya yang sangat minim. Karena itulah mereka tidak bisa menabung. Padahal tabungan adalah sumber utama pembentukan modal masyarakat. Untuk bisa membangun, maka lingkaran setan itu harus diputus, yaitu pada titik lingkaran rendahnya produktivitas, sebagai sebab awal dan pokok. Caranya adalah dengan memberi modal kepada pelaku ekonomi. Masalahnya adalah, dari mana modal itu diperoleh? Jawabnya adalah, utang dari luar. Jadi adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas sehingga mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi yang berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya.

## B. Indikator/Kriteria Kemiskinan

Pola kemiskinan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia di antaranya dapat didekati dengan beberapa perspektif: *pertama*, Kemiskinan Individual. Kemiskinan ini terjadi karena adanya kekurangan yang disandang seorang individu mengenai syarat-syarat yang

diperlukan untuk mengentaskan dirinya dari kemiskinan.

*Kedua*, Kemiskinan Relatif. Dalam pengertian sosiologis kemiskinan seperti ini diasosiasikan dengan SES *socioeconomic status*. Untuk menentukan SES diadakan perbandingan antara taraf kekayaan material dari keluarga atau rumah tangga di dalam suatu komunitas territorial. *Ketiga*, Kemiskinan Struktural menurut konsep Selo Soemardjan, adalah kemiskinan yang disandang suatu golongan yang *built in* atau menjadi bagian yang seolah-olah tetap ada dalam struktur suatu masyarakat. Kemiskinan ini juga disebabkan suatu kebijakan suatu rezim pemerintahan. *Keempat*, Kemiskinan Budaya. Kemiskinan yang diderita oleh suatu masyarakat di tengah lingkungan alam yang mengandung cukup banyak bahan kekayaan alam. *Kelima*, Budaya Kemiskinan. Budaya kemiskinan adalah tata hidup yang mengandung sistem kaidah dan sistem nilai-budaya yang menganggap bahwa taraf hidup miskin yang disandang suatu masyarakat pada suatu waktu adalah wajar dan tidak perlu diusahakan perbaikannya.

Dalam mengkaji kemiskinan, sedikitnya terdapat 9 dimensi kemiskinan yang perlu dipertimbangkan yaitu: (1) ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar (pangan, sandang, dan perumahan), (2) aksesibilitas yang rendah terhadap kebutuhan dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi yang baik, air bersih, dan transportasi), (3) lemahnya kemampuan untuk melakukan akumulasi kapital, (4) rentan terhadap faktor goncangan faktor eksternal yang bersifat individual maupun masal, (5) rendahnya kualitas sumber daya

manusia dan penguasaan sumber daya alam, (6) ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, (7) terbatasnya akses terhadap kesempatan kerja secara berkelanjutan, (8) ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental, dan (9) ketidakmampuan secara sosial.

Menurut BPS, terdapat 14 (empat belas) kriteria keluarga miskin yakni: 1) luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m<sup>2</sup> per orang; 2) jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/ bamboo/ kayu murahan; 3) jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bamboo/rimbia/ kayu berkualitas rendah/dinding tembok tidak dipleseter; 4) tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain; 5) sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik; 6) sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan; 7) kayu bakar/ arang/ minyak tanah sebagai bahan bakar memasak sehari-hari; 8) mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam 1 minggu; 9) hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun; 10) hanya sanggup makan satu kali/ dua kali dalam 1 hari; 11) tidak sanggup membayar pengobatan di puskesmas/ poliklinik; 12) sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dgn luas lahan 0,5 Ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lain dengan pendapatan di bawah Rp600.000,- per bulan; 13) pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/ hanya tamat SD; dan 14) tidak memiliki tabungan/barang mudah dijual dengan nilai Rp500.000,- seperti sepeda motor, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal

lainnya. Kriteria tersebut menghasilkan pengelompokan rumah tangga sejahtera yakni:

Bappenas menggunakan beberapa pendekatan utama, antara lain pendekatan kebutuhan dasar (*basic need approach*) dan pendekatan pendapatan (*income approach*). Pendekatan kebutuhan dasar melihat kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang, keluarga, dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum, antara lain pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih, dan sanitasi. Pendekatan pendapatan melihat kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya penguasaan aset dan alat-alat produktif seperti tanah dan lahan pertanian dan perkebunan, sehingga secara langsung mempengaruhi pendapatan seseorang dalam masyarakat.

Variabel untuk menentukan apakah suatu rumah tangga layak atau tidak dikatakan miskin sekaligus menentukan skoring tingkat keparahan kemiskinannya yaitu: (1)

luas bangunan; 2) jenis lantai, (3) jenis dinding, (4) fasilitas buang air besar, (5) sumber air minum, (6) sumber penerangan, (7) jenis bahan bakar untuk memasak, (8) frekuensi membeli daging, ayam, dan susu seminggu, (9) frekuensi makan sehari (10) jumlah stel pakaian baru yang dibeli setahun, (11) akses ke puskesmas atau poliklinik, (12) lapangan pekerjaan, (13) pendidikan tertinggi kepala rumah tangga, dan (14) kepemilikan beberapa aset.

### Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan pendekatan model *Ordinary Least Square (OLS)* dengan teknik pengolahan data yang menggunakan software SAS 9.0. Variabel yang digunakan adalah data pertumbuhan ekonomi (PDB), pendapatan perkapita (PDB Perkapita), jumlah penduduk miskin di DI Yogyakarta, dan regulasi daerah khusus Yogyakarta sebagai dummy. Adapun hasil olah data adalah sebagai berikut.

Variabel	Dugaan Parameter	t-hitung	Pr >  t	Elastisitas		Label
				Jangka Pendek	Jangka Panjang	
Intercept	1.63	0.44	0.67			Intersep
PDBP	-0.04	-1.50 <sup>D</sup>	0.17	-0.5995	-7.1263	Pendapatan Per Kapita DIY (Rp./Kapita/Tahun)
RHRICER	0.06	0.09	0.93	0.0000	0.0000	Rasio Harga Beras dgn. Harga Dasar Gabah
DKIS	0.02	0.61	0.56			Dummy Regulasi Kekhususan DIY 2012
LJPM	0.92	3.61 <sup>A</sup>	0.01			Jumlah Penduduk Miskin DIY t-1
R2 = 88.62%, F-hitung = 15.58, DW = 1.93						

Keterangan: A : signifikan di 5 persen (PDBP)  
D : signifikan di 20 persen. (DKIS)

Dimana:

PDBR = 'PDB DIY (Rp. Miliar)'  
PDBP = 'Pendapatan Per Kapita DIY (Rp./Kapita/Tahun)'  
JPM = 'Jumlah Penduduk Miskin DIY (Orang)'  
HRICER = 'Harga Beras (Rp/kg)'



HGABR	= 'Harga Dasar Gabah (Rp/kg)'
RHRICER	= 'Rasio Harga Beras dg Harga Dasar Gabah'
DKIS	= 'Dummy Regulasi Kekhususan DIY 2012'
LJPM	= 'Jumlah Penduduk Miskin DIY t-1';

Hasilnya adalah sebagai berikut:

$$JPM_t = 1.63 - 0.04PDBP_t + 0.06RHRICER_t + 0.02DKIS_t + 0.92LJPM_t$$

(0.44) (-1.50) (0.09) (0.61) (3.61)

Keterangan:

- Penurunan pertumbuhan pendapatan per kapita penduduk (PDBP) DIY sebesar 1 persen, maka akan menurunkan pertumbuhan jumlah penduduk miskin DIY sebesar 0.04 persen, *ceteris paribus*. Dalam jangka panjang respon pertumbuhan jumlah penduduk miskin DIY terhadap perubahan pertumbuhan pendapatan per kapita penduduk DIY bersifat elastis.
- Peningkatan pertumbuhan rasio harga beras dan harga dasar gabah (GKG) sebesar 1 persen, maka akan meningkatkan pertumbuhan jumlah penduduk miskin DIY sebesar 0.06 persen, *ceteris paribus*. Baik dalam jangka pendek dan jangka panjang pertumbuhan jumlah penduduk miskin DIY terhadap pertumbuhan rasio harga beras dan harga dasar gabah bersifat *inelastic*.
- Ketika regulasi kekhususan yang berlaku di Provinsi DIY dalam UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta diberlakukan, maka pertumbuhan jumlah penduduk miskin di DI Yogyakarta cenderung meningkat sebesar 0.02 persen, *ceteris paribus*.
- Peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk miskin DIY tahun lalu sebesar 1 persen, maka akan meningkatkan pertumbuhan jumlah penduduk miskin DIY

tahun sekarang sebesar 0.92 persen, *ceteris paribus*. Atau terdapat waktu yang relatif lambat

bagi pertumbuhan jumlah penduduk miskin DIY untuk kembali menyesuaikan pada tingkat keseimbangannya dalam merespon perubahan situasi perekonomian.

### Pembahasan Strategi Penanggulangan Kemiskinan di DI Yogyakarta

Indonesia masih harus menghadapi 3 (tiga) masalah mendasar dalam upaya menghapus kemiskinan, yaitu: *pertama*, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk miskin tidak akan dapat dikurangi secara signifikan tanpa adanya pertumbuhan ekonomi yang bermanfaat bagi orang miskin. Periode setelah krisis 1998 menunjukkan berkurangnya penduduk miskin lebih banyak disebabkan oleh membaiknya stabilitas ekonomi dan turunnya harga bahan makanan. Untuk menurunkan tingkat kemiskinan lebih jauh lagi, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi merupakan suatu keharusan.

*Kedua*, peningkatan pelayanan sosial bagi masyarakat miskin. Peningkatan dalam efektivitas dan efisiensi pemberian pelayanan sosial, dapat dicapai dengan mengusahakan perbaikan dalam sistem kelembagaan dan kerangka hukum, termasuk dalam aspek-aspek yang terkait dengan

desentralisasi. Hal ini akan membuat penyedia jasa mengenali tanggung jawab mereka dalam menjaga kualitas pelayanan yang diberikan, di samping memberikan kesempatan bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengawasi aktivitas tersebut.

*Ketiga*, perlidungan bagi si miskin. Kebanyakan penduduk Indonesia rentan terhadap kemiskinan. Hampir 40% penduduk hidup hanya sedikit di atas garis kemiskinan nasional dan mempunyai pendapatan kurang dari US\$2 per hari. Perubahan sedikit saja dalam tingkat harga khususnya harga BBM, pendapatan, dan kondisi kesehatan, dapat menyebabkan mereka berada dalam kemiskinan, setidaknya untuk sementara waktu.

Upaya untuk menanggulangi kemiskinan di DI Yogyakarta, diperlukan upaya yang memadukan berbagai kebijakan dan program pembangunan yang tersebar di berbagai sektor. Kebijakan pengentasan kemiskinan menurut Gunawan Sumodiningrat dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu kebijakan tidak langsung, dan kebijakan yang langsung. Kebijakan tak langsung meliputi: (1) upaya menciptakan ketentraman dan kestabilan situasi ekonomi, sosial dan politik, (2) mengendalikan jumlah penduduk, (3) melestarikan lingkungan hidup dan menyiapkan kelompok masyarakat miskin melalui kegiatan pelatihan. Sedangkan kebijakan yang langsung mencakup: (1) pengembangan data dasar (*base data*) dalam penentuan kelompok sasaran (*targeting*), (2) penyediaan kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan), (3) penciptaan kesempatan kerja, (4) program pembangunan wilayah, dan (5) pelayanan perkreditan.

Gunawan Sumodiningrat menjelaskan perlu strategi yang memperkuat peran dan posisi perekonomian rakyat dalam perekonomian nasional, sehingga terjadi perubahan struktural yang meliputi pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan, pemberdayaan sumber daya manusia. Program yang dipilih harus berpihak dan memberdayakan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan peningkatan perekonomian rakyat. Program ini harus diwujudkan dalam langkah-langkah strategis yang diarahkan langsung pada perluasan akses masyarakat miskin kepada sumber daya pembangunan dan menciptakan peluang bagi masyarakat paling bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga mereka mampu mengatasi kondisi keterbelakangannya. Selain itu penanggulangan kemiskinan harus senantiasa didasarkan pada penentuan garis kemiskinan yang tepat dan pada pemahaman yang jelas mengenai sebab-sebab timbulnya persoalan tersebut.

Hasil riset Ahcmad Fatony menjelaskan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan berbasis *participatory poverty assessment* di DIY efektif dilaksanakan, karena pendekatan ini disadari sebagai pendekatan yang memadai dalam pemberdayaan masyarakat. Namun di tingkat implementasi, dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, masih kurang melibatkan penduduk miskin sebagai subyek atas kegiatan untuk memecahkan masalah mereka sendiri (*self help*). Pada umumnya yang memperoleh program kebijakan pengentasan kemiskinan bukanlah orang-orang miskin, tetapi mereka

yang memiliki akses informasi dan dekat dengan kekuasaan lokal.

Program perlindungan sosial di DI Yogyakarta yang ada tidaklah mencukupi dalam menurunkan tingkat resiko bagi keluarga miskin, walaupun memberikan manfaat pada keluarga yang lebih mampu. Kondisi ini dapat diperbaiki dengan menyediakan program perlindungan

sosial yang lebih bermanfaat bagi penduduk miskin serta masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan. Tim Nasional Percepatan dan Penanggulangan Kemiskinan (TNPPK) telah membuat program penanggulangan kemiskinan di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi DI Yogyakarta (lihat tabel di bawah).

**Tabel 3. Program Tim Nasional Percepatan dan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta**

Keterangan	Program	Sasaran
<b>Kelompok Program 1</b>	Program Keluarga Harapan (PKH)	Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin
	Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)	Rumah Tangga Hampir Miskin, Miskin, dan Sangat Miskin
	Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin)	Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin
	Program Beasiswa Pendidikan untuk Keluarga Miskin	Siswa dari Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin
	Sekolah Dasar (SD/MI)	Siswa SD dari Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin
	Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	Siswa SMP/MTs dari Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin
	Sekolah menengah Atas (SMA/MA/SMK)	Siswa SMA/MA/SMK dari Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin
	Pendidikan Tinggi (Diploma dan Sarjana)	Mahasiswa dari Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin
<b>Kelompok Program 2</b>	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri:	Kelompok Masyarakat Umum
	a. PNPM Mandiri Perdesaan	Kelompok Masyarakat Perdesaan
	b. PNPM Mandiri Perkotaan	Kelompok Masyarakat Perkotaan
	c. PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus	Kelompok Masyarakat Pedalaman, Tertinggal dan Khusus (bencana, konflik, dan lain-lain)
	d. PNPM Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP)	Kelompok Masyarakat Perdesaan
	e. PNPM Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Wilayah (PISEW)	Kelompok Masyarakat Perdesaan
	f. PNPM Peningkatan Usaha Agrobisnis Pertanian (PUAP)	Kelompok Masyarakat Pertanian Perdesaan
	g. PNPM Kelautan dan Perikanan (KP)	Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pelaut
	h. PNPM Pariwisata	Kelompok Masyarakat Perdesaan Potensial

	i.PNPM Generasi	Kelompok Masyarakat Perdesaan
	j.PNPM <i>Green Kecamatan Development Program (G-KDP)</i>	Kelompok Masyarakat Perdesaan
	k.PNPM <i>Neighbourhood Development (ND)</i>	Kelompok Masyarakat Perkotaan
<b>Kelompok Program 3</b>	Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Program KUBE dan UEP	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kelompok Usaha Bersama dan Usaha Ekonomi Produktif

Sumber: Tim Koordinasi Penganggulan Kemiskinan Daerah DIY, 2013 dan Penjelasan Pejabat dari Dinas Sosial Provinsi DIY.

Selain itu, pemerintah Provinsi DIY bersama-sama pemerintah pusat melakukan program bantuan sosial berbasis keluarga (BSBK) yang

secara detail dapat dilihat pada tabel 4.

**Tabel 4. Program Bantuan Sosial Berbasis Keluarga (BSBK) di Provinsi DI Yogyakarta**

Keterangan	BLSM 2012 (Bantuan Tunai)	Raskin (Beras/Pangan)	Jamkesmas (Asuransi kesehatan)	BSM (Pendidikan)	PKH (Bantuan Tunai Bersyarat)
Jenis Transfer	Tunai	Beras bersubsidi	Biaya pelayanan kesehatan gratis	Tunai	Tunai dan bersyarat
Sasaran	Miskin dan hampir miskin	Miskin dan hampir miskin	Miskin dan hampir miskin	Murid dan RT Miskin	Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)
Jumlah Penerima	18,5 juta RT	17,5 juta RT	18,2 juta RT	4.560.501	1,5 juta RTSM
Jumlah Bantuan	Rp150.000 per bulan	14 kg beras per bulan	Tidak terbatas	Rp561.759 per tahun	Rp1.287.000 per tahun
Lembaga Pelaksana Utama	Kemensos	Bulog dan Kemendagri	Kemenkes	Kemendiknas, Kemenag	Kemensos

Sumber: Tim Koordinasi Penganggulan Kemiskinan Daerah DIY, 2013 dan penjelasan dari Pejabat Dinas Sosial Provinsi DIY.

Sejak 1999, pemerintah provinsi DIY telah membuat Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di DIY melalui Program P2KP peduli yang diwujudkan ke dalam 3 bentuk yakni: *pertama*, Unit Pengelolaan Lingkungan (UPL); *kedua*, Unit Pengelolaan Keuangan (UPK); *ketiga*, Unit Pengelolaan Sosial (UPS). Salah satu keunggulan P2KP adalah dengan melibatkan masyarakat sebagai agen utama. Dalam bahasa yang lebih populer disebut *community based program*. Dalam program P2KP, peran birokrasi dan fasilitator diminimalisir. Sebaliknya, Badan Keswadayaan Masyarakat sebagai

representasi kelembagaan masyarakat di tingkat lokal dan diberdayakan sebaik mungkin. Program P2KP yang paling menonjol adalah dana bergulir bagi kelompok usaha miskin. Sistem yang dibangun dalam dana bergulir ini adalah tanggung-renteng. Dengan demikian setiap individu dalam kelompok punya tanggung jawab mengembalikan dana pinjaman itu yang selanjutnya akan digulirkan untuk kelompok usaha miskin lainnya. Modal awal dana bergulir ini dianggarkan Pemerintah DIY dengan bervariasi sesuai dengan kondisi geografis dan sosial ekonomi kabupaten/ kota. Di Kabupaten

Bantul dana awal mulai dari Rp100 juta sampai dengan Rp 500 juta.

Data KemenKoKesra RI menunjukkan data realisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di DIY tahun 2013 dengan total dana PNPM/BLM berjumlah Rp 126.600,-

juta. Di samping itu dalam APBN 2013 dialokasikan sebanyak Rp120.270,00 juta dan dalam APBD Provinsi DIY 2013 dialokasikan sebanyak Rp6.330,00 juta, yang dirinci per kabupaten/kota (lihat tabel).

**Tabel 5. Anggaran Program Penanggulangan Kemiskinan di DI Yogyakarta Tahun 2013 (Rp Juta)**

No.	Kabupaten/Kota	PNPM/BLM	APBN	APBD
1	Kab.Bantul	24.475,00	23.251,25	1.223,75
2	Kab.Gunung Kidul	48.500,00	46.075,00	2.425,00
3	Kab.Kulon Progo	30.275,00	28.761,25	1.513,75
4	Kab.Sleman	17.875,00	16.981,25	893,75
5	Kota Yogyakarta	5.475,00	5.201,25	273,75
	Total Provinsi DIY (78 Kecamatan)	126.600,00	120.270,00	6.330,00

Sumber: "Daftar Lokasi PNPM Mandiri Provinsi DIY Tahun 2013", <http://datakesra.menkokesra.go.id/> diakses 11 Maret 2014.

Di samping itu menurut pejabat Dinas Sosial DI Yogyakarta, saat ini pemerintah sedang melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) yakni program Kementerian Sosial RI berupa bantuan uang tunai bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Program ini berbeda dengan program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Berdasarkan keterangan Asisten Pemberdayaan Masyarakat Provinsi DIY, DIY sebagai daerah tujuan wisata bukan jadi jaminan bahwa masyarakatnya lebih makmur dibanding dengan masyarakat di daerah lain. Masalah kemiskinan dan pengangguran tetap menjadi permasalahan pelik untuk dipecahkan di DIY. Penyebab kemiskinan dan pengangguran antara lain adalah kekurangan kebutuhan dasar, tidak mempunyai usaha produktif, tidak mempunyai ketrampilan, daerah yang kurang produktif, ketidakmampuan daerah tertinggal, serta tidak mempunyai modal. Sementara itu, program Kredit Usaha Rakyat (KUR)

yang diluncurkan sejak 2007 di Indonesia termasuk di Provinsi DI Yogyakarta, periode 2007-2011 volume KUR yang sudah disalurkan ke Provinsi DI Yogyakarta untuk membantu masyarakat miskin sebesar 1,86% dari total KUR dengan jumlah debitur sebanyak 2,43%.

Pelaksanaan program KUBE dan UEP di DI Yogyakarta juga menemui beberapa kendala. Sebagai contoh, program KUBE yang merupakan program kelompok ini tidak dapat memenuhi persyaratan tanggung renteng. Jenis usaha yang berbeda-beda setiap anggota KUBE menjadikan keterikatan antar-anggota dalam kelompok ini kurang kuat. Justru dari keterangan PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) yang merupakan pendamping program dari Dinas Sosial DI Yogyakarta, kelompok ini tidak sedikit yang terbentuk secara mendadak. Waktu persiapan yang cukup singkat juga menjadi keluhan para pendamping sosial dalam mempersiapkan program-program yang ada di lapangan.

Berdasarkan penjelasan Bappeda Provinsi DI Yogyakarta, bahwa Pemprov DIY tahun 2013 menggelontorkan bantuan sosial (Bansos) sebesar Rp46 miliar untuk 46.000 kepala keluarga (KK) miskin produktif yakni Kota Yogyakarta Rp1,9 Miliar; Kab.Bantul Rp13 Miliar; Kab.Kulonprogo Rp6,7 Miliar; Kab.Gunung Kidul Rp16,6 Miliar dan Kab.Sleman Rp8,1 Miliar. Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) dengan kajian di lapangan untuk menekan angka kemiskinan DIY hingga 2% pada tahun 2013, merekomendasikan harus memberi insentif atau bantuan sosial kepada 46.000 warga miskin. Sedangkan jika ingin menurunkan 3% angka kemiskinan maka dibutuhkan intervensi anggaran dari APBD sampai 60.000 warga miskin tergantung pada kemampuan APBD DIY. Kepala Bappeda menjelaskan sesuai kemampuan APBD, DIY masih mampu memberikan bantuan sosial kepada 46.000 orang dan sudah mendapat persetujuan DPRD sehingga setiap KK miskin akan mendapatkan bantuan sebesar Rp1 juta. Bantuan itu bukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi namun digunakan untuk kegiatan produktif lain serta berdasarkan pertimbangan garis kemiskinan di DIY pendapatannya berkisar Rp280 ribu per bulan.

Pemprov DIY juga telah mengeluarkan kebijakan pengadaan beras untuk rakyat miskin (Raskin) 2013 melalui Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90/KEP/2013 tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan Jumlah Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota Tahun 2013. Sebanyak 288 391 Rumah Tangga Sasaran mendapatkan bantuan Raskin

yang didistribusikan Perum. BULOG Divre DIY

### **Penutup** **Simpulan**

Walaupun secara normatif, pemerintah Provinsi DI Yogyakarta telah mengidentifikasi dan mengetahui faktor penyebab utama kemiskinan di DIY, tetapi penurunan angka kemiskinan tidak terlalu signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini antara lain disebabkan kondisi penduduk miskin dari sisi social-ekonomi sangat sulit untuk keluar dari kemiskinan yang sebagian besar tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mampu melakukan kegiatan usaha produktif karena ketiadaan modal dan factor produksi lain. Ketidakmampuan ekonomi penduduk miskin diperkuat dengan hasil metode analisis OLS yang menunjukkan bahwa pendapatan perkapita (PDBP) sangat mempengaruhi kemiskinan di DIY. Potensi SDA DI Yogyakarta yang minim sangat mempengaruhi upaya melakukan distribusi pendapatan ke masyarakat. Keterbatasan dana anggaran APBD juga mempengaruhi upaya percepatan kesejahteraan masyarakat di DIY.

Kebijakan pengentasan kemiskinan di DI Yogyakarta harus dilakukan secara terus menerus dengan melakukan evaluasi kebijakan dan program guna mencari solusi strategis di masa datang, termasuk peningkatan anggaran baik APBD maupun APBN. Pengembangan usaha-usaha mikro dan kecil (usaha produktif) akan sangat membantu penduduk miskin untuk mandiri, walaupun kebijakan RASKIN dan BLT/BLM juga dipandang membantu kelompok miskin dalam jangka pendek.

## Saran

Dalam upaya pengetasan kemiskinan di DI Yogyakarta, pemerintah Provinsi DI Yogyakarta perlu mempertajam dan membuat prioritas program yang kongkrit setelah memetakan permasalahan kemiskinan penduduk. Pemerintah perlu mengembangkan sektor unggulan daerah yang sangat potensial agar dapat memberikan *multiplier effect* bagi ekonomi masyarakat secara keseluruhan, termasuk penduduk miskin dan berpenghasilan sangat rendah.

## Daftar Rujukan

Badan Pusat Statistik, *Survei Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005/2006*, Penerbit BPS RI.

-----, *Statistik Indonesia Tahun 2013*, Penerbit BPS.

-----, *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia*, 2010, Penerbit BPS, Hal.41.

Gujarati, N.D., 2003. *Basic Econometrics*. 4th ed. New York: McGraw-Hill Companies, Inc.

Gunawan Sumodiningrat, "Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa: Menanggulangi Kemiskinan Dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat", Penerbit Elex Media Komputindo, Jakarta, 2009, ISBN: 9789792757408.

Prayitno, Ujianto Singgih, *Memerangi Kemiskinan: Dari*

*Ore Baru Sampai Reformasi*, Penerbit Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI, 2010, ISBN: 978-979-9052-57-5.

-----, "Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Melalui Pengembangan Sektor Informal: Kasus Yogyakarta", dalam Buku *Pembangunan Sosial*, Penerbit Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI, Cetakan Pertama, 2010, ISBN:978-602-9052-59-6.

-----, *Kebijakan Pembangunan Yang Berpihak Pada Masyarakat Miskin: Studi Pembangunan Masyarakat Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan di Kota Batam*, Laporan Penelitian, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI, 2010.

Kementerian Keuangan RI, *Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011*.

-----, *Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012*.

-----, *Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja*

Negara Tahun  
Anggaran 2013.

-----, *Nota  
Keuangan dan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja  
Negara Tahun  
Anggaran 2014.*

Kementerian Sekretariat Negara RI,  
*Lampiran Pidato Presiden RI  
pada Sidang Bersama  
DPR RI dan DPD RI  
tanggal 16 Agustus 2011.*

-----  
*--, Lampiran Pidato Presiden  
RI pada Sidang Bersama  
DPR RI dan DPD RI  
tanggal 16 Agustus 2012.*

-----  
*-, Lampiran Pidato Presiden  
RI pada Sidang Bersama  
DPR RI dan DPD RI  
tanggal 16 Agustus 2013.*

Retnaningsih, Hartini, *“Catatan  
Kritis Tentang Penanggulan-  
gan kemiskinan*, dalam  
Buku Pembangunan Sosial,  
Penerbit Pusat Pengkajian  
Pengolahan Data dan  
Informasi, Sekretariat  
Jenderal DPR RI, Cetakan  
Pertama 2010, ISBN:978-  
602-9052-59-6.

Tim Nasional Percepatan Penanggulan-  
gan Kemiskinan (TNP2K),  
*“Buku Panduan Penanggulan-  
gan Kemiskinan”*, Penerbit  
Sekretariat TNP2K Pusat.

Keputusan Gubernur Daerah  
Istimewa Yogyakarta Nomor  
90/KEP/2013 tentang Pene-  
tapan Rumah Tangga

Sasaran (RTS) dan Jumlah  
Bantuan Keuangan Khusus  
Kepada Kabupaten/Kota tahun  
2013.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa  
Yogyakarta Nomor 22 Tahun  
2013 Tentang Pedoman  
Penyaluran Bantuan  
Keuangan Dalam Upaya  
Pengentasan Kemiskinan  
Tahun Anggaran 2013.

“Indikator Kemiskinan, Memahami  
Masalah Kemiskinan di  
Indonesia”, dalam  
[http://www.81tn.com/indikat-  
or-kemiskinan-memahami-  
masalah-kemiskinan-di-  
indonesia](http://www.81tn.com/indikator-kemiskinan-memahami-masalah-kemiskinan-di-indonesia), diakses 12  
November 2013.

“Mengurangi Kemiskinan”, dalam  
[http://siteresources.worldban-  
k.org/INTINDONESIA/Reso-  
urces/Publication//reducing  
poverty.pdf](http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/Publication/reducing-poverty.pdf), diakses 11  
November 2013.

“Meta Data Subdit Statistik  
kerawanansosial”, [http://www  
.bps.go.id/menutab.php?tabel  
=1&id\\_subyek=23](http://www.bps.go.id/menutab.php?tabel=1&id_subyek=23), diakses  
13 Januari 2014.

“Program Keluarga Harapan (PKH)  
Untuk DIY Diluncurkan”,  
[http://indonesia.go.id/en/inde-  
x.php?option=com\\_content&t-  
ask=view&id=1272&Itemid  
=701](http://indonesia.go.id/en/index.php?option=com_content&task=view&id=1272&Itemid=701), diakses 24  
Januari 2013.

“Kemiskinan: Telaah dan Beberapa  
Strategi Penanggulangan”,  
dalam [http://www.scribd.com/  
doc/93376514/Kemiskinan-](http://www.scribd.com/doc/93376514/Kemiskinan-)



Telaah-Dan-Beberapa-Strategi-Penanggulangan-  
nya, diakses 11 November  
2013.

“The Life and Work of Ragnar  
Nurkse”, dalam  
[www.ttu.ee/public/s/Instituud  
id/nurkse.pdf](http://www.ttu.ee/public/s/Instituudid/nurkse.pdf)., diakses 15  
Januari 2014.

“Tingkat Kemiskinan di DIY  
Tertinggi Se-Jawa”, dalam  
[http://www.republika.co.id/be  
rita/nasional/jawa-tengah-diy-](http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-tengah-diy-)

nasional/13/01/02/mfzoyv-  
tingkat-kemiskinan-  
di-diy-tertinggi-sejawa,  
diakses 2 Oktober 2013).

“Jumlah Penduduk Miskin DIY  
Turun Tipis”, dalam  
[www.krjogya.com](http://www.krjogya.com), diakses 15  
Janurai 2014.

“Daftar Lokasi PNPM Mandiri  
Provinsi DIY Tahun 2013”,  
<http://datakesra.menkokesra.go.id/>,  
diakses 11 Maret 2014.